

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, 2014, *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014, Kemitraan Partnership*, Jakarta
- Djulaeka, Rahayu Devi, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Fadjar, Mukthie A. 2013, *“Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Miriam Budirjo 2008 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendra Sudrajat, Et. Al., 2023, *“Politik Hukum Pemilu”*, Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Idea, I., 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA, Indonesia Printer*, Jakarta. Buku asli dicetak di Trydells Tryckeri AB, Swedia.
- Prof. Dr. Zainal Arifin hoesein, S.H., M.H, Arifudin, S.H., M.H, 2017, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok.
- Refly Harun,2016, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2016, hal 32.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Topo Santoso, Ida Budhiati, 2019, *“Pemilu” Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waridjo, Phd, 2020, *“Tata Kelola Partai: Bagaimana Partai Politik Bekerja Dalam Gelombang Demokrasi?”*, Gerhana Publishing, Medan.
- Zainuddun Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020

C. Jurnal

Agus Dedi, 2019, "*Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak.*" Dalam Jurnal Moderat VOL.5 No.3 Agustus 2019.

Asrinaldi, 2020, "*Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas.*". Dalam jurnal KPU. Maret 2020.

Beni Kharisma Arrasuli, 2019, "*Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis.*". Dalam jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 No. 1. Februari 2019.

Indra Madan Putra, Ria Ariany, Syahrizal, 2019, "*Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.*". Dalam JISPO VOL. 9. Juni Tahun 2019.

Khairul Fahmi, 2016. Menelusuri konsep keadilan pemilihan umum menurut UUD 1945. Dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No. 2

Khairul Fahmi, *Et. Al.*, 2020 "*Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatra Barat.*". Dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 1. Maret 2020.

Lusy Liani, 2016, “Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum”. Dalam jurnal Cita Hukum Tahun 2016.

Primandha Sukma Nur Wardhani, 2018, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum.” Dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Juni 2018. Yulyani Dewi, 2022 “Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol di Provinsi Jawa Timur”. Dalam Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 4 No. 1. November 2022

D. Internet

Mario Sofia Nasution, “KPU: Baru Sekitar 5 Persen Dokumen Persyaratan Anggota DPRD Sumbar Memenuhi Syarat”.
<https://sumbar.antaraneews.com/berita/571647/kpu-baru-sekitar-5-persen-dokumen-persyaratan-anggota-dprd-sumbar-memenuhi-syarat>.
Diakses pada 4 Juli 2023.

Politik RMOL.ID, “Di Hadapan DPR RI, Bawaslu Protes ke KPU Belum Dapat Akses Sipol.” <https://politik.rmol.id/read/2022/07/07/539465/dihadapan-dpr-ri,-bawaslu-protes-ke-kpu-belum-dapat-akses-sipol->.
Diakses pada 4 Juli 2023.

Situs website Komisi Pemilihan Umum, “Sejarah Penyelenggaran Pemilihan Umum”. <https://www.kpu.go.id/>. Diakses pada 28 februari 2023.

Situs website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, <https://kab-tanjungjabungtimur.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu#:~:text=%2FKPU%20yang%20ada%20sekarang%20merupakan,pe%20utama%20diantik%20Presiden%20BJ%20Habibie>. Diakses pada 28 februari 2023.

Situs website Komisi Pemilihan Umum, “Sejarah Penyelenggaran Pemilihan Umum”. <https://www.kpu.go.id/>. Diakses pada 28 februari 2023.

Surya Dua Artha Simanjuntak, "Pemilu 2024, KPU Ungkap 6 Permasalahan Verifikasi Administrasi Parpol".
<https://kabar24.bisnis.com/read/20220823/15/1569608/Pemilu-2024-kpu-ungkap-6-permasalahan-verifikasi-administrasi-parpol>. Diakses pada 4 Juli 2023

Winda, “Polemik Verifikasi Parpol, KPU Sumbar Diterpa Isu Intervensi”.
Mario Sofia Nasution, “KPU: Baru Sekitar 5 Persen Dokumen Persyaratan Anggota DPRD Sumbar Memenuhi Syarat”.
<https://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-34588/polemik-verifikasi-parpol-kpu-sumbar-diterpa-isu-intervensi/>. Diakses pada 4 Juli 2023..
Diakses pada 4 Juli 2023.